Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Zulhamidah, Juliana Nasution
Program Studi Akuntansi Syariah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
zulhamidah95@gmail.com, juliananasution@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the system and procedures for receiving local revenue are carried out at the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang City. Systems and procedures are stages or revenue streams from data collection to data processing with regional financial management guidelines and government regulations applied so that they can be assessed whether they are appropriate or not. The data that are managed in this study are the systems and procedures for receiving original local revenue that are in the financial management agency and the regional assets of Palembang. Data analysis and discussion were carried out with a descriptive qualitative analysis method, namely by collecting and analyzing theories from various sources and experts as literature, so that these theories were linked to applications that have been applied to the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang City in the admission process

Keywords: system, Procedure, PAD.

Pendahuluan

Peraturan keuangan daerah yang ada saat ini telah menjadi informasi yang penting dan berguna bagi pengguna tentang sistem dan prosedur keuangan daerah, sehingga dapat dikumpulkan dan digunakan untuk memberikan informasi transaksi ekonomi dan keuangan kepada eksekutif, yudikatif, dan masyarakat. Terciptanya Good Governance telah menjadi harapan dan keinginan besar masyarakat untuk mencapai dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Menurut Erlina, dkk (2015), akuntansi keuangan daerah ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintah pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Kepercayaan, yang sangat penting untuk dipahami dalam sistem keuangan daerah ini, yaitu antara peraturan pemerintah dalam penerapannya kepada lembaga yang bersangkutan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi pemerintahan yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah pusat di daerah akan menjalankan sistem yang telah dibuat dan tetap berdasarkan peraturan pemerintah khususnya pemerintah dalam negeri. (permendagri). Sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan keuangan daerah adalah proses penafsiran dan pengikhtisaran peristiwa keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

.Dalam penelitian ini fokusnya hanya pada penerimaan pendapatan daerah yaitu menilai bagaimana sistem dan prosedur penerimaannya berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah yang berlaku, sehingga aliran penerimaan PAD dapat dinilai dan disesuaikan. , selain penilaian berdasarkan peraturan dan pedoman, perlu juga penetapan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik dalam melaksanakan kegiatan operasional penerimaan pendapatan daerah.

Dalam penetapan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan atas pelaksanaan dan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala, berdasarkan kajian dari peneliti yang telah dilakukan oleh Raisa et al (2015), dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ada yaitu badan pengelola Pada keuangan dan aset daerah Kabupaten Sitaro tidak ditemukan indikasi dan semua sistem penerimaan pendapatan daerah telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan

standar akuntansi pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik, dengan ini dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah relevan.

Dalam hal ini, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan berbagai sumber pertimbangan, peneliti ingin menilai apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan telah dilakukan dengan baik di badan keuangan dan pengelolaan aset daerah kota Medan. Sebagai titik fokus dalam penelitian ini hanya penerimaan pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam laporan keuangan daerah dan laporan realisasi anggaran sebagai perkiraan dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam menentukan anggaran belanja daerah yang akan dilaksanakan. Sebelum menentukan perkiraan anggaran belanja, diperlukan sistem dan prosedur yang baik untuk mengatur setiap tahapan penerimaan daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah lembaga yang mengatur dan mengelola kekayaan daerah yang meliputi perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam menjalankan fungsinya badan pengelola keuangan daerah kota Palembang mengemban visi mewujudkan sistem pelayanan yang profesional dan transparan serta sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel bagi pemerintahan yang bertanggung jawab, oleh karena itu sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengelola keuangan daerah khususnya kota Medan perlu dibangun suatu sistem yang baik untuk mengatur kebijakan yang dilakukan secara objektif dan berkelanjutan, di era sekarang ini lintas sektoral. koordinasi daerah atau lintas sektoral dalam penyelesaian dan penanganannya suatu permasalahan yang dihadapi mudah dan relevan, serta penerapan sistem keuangan yang baik terutama dalam pengelolaan daerah yang sering diterapkan, agar semua sektor dapat berjalan dengan hati-hati, perlu memperkuat regulasi yang tepat dalam pelaksanaan dan realisasinya, untuk memudahkan manajer dan pengguna menggunakan informasi keuangan.

Sistem dan prosedur pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam tahap pelaporan realisasi anggaran, pengambilan keputusan dan untuk informasi bagi pengguna dan masyarakat, perlu adanya transparansi dalam memberikan informasi keuangan daerah, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kekuasaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sistem dan tata cara penerimaan penerimaan pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dimulai dari tahap pencatatan penerimaan pendapatan oleh pihak terkait yaitu OPD, bendahara penerimaan dan pembukuan/ bagian akuntansi, selanjutnya dibuat laporan pertanggungjawaban penerimaan PAD, yang akan digunakan untuk verifikasi dan penyetoran ke bank, dari langkah-langkah tersebut akan dinilai apakah pelaksanaan penerimaan PAD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mulai dari tahap pencatatan penerimaan, pembuatan laporan, verifikasi hingga tahap setoran dalam penerimaan PAD pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di kota Medan.

Penerimaan PAD di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah berjalan baik dengan peraturan pemerintah terbaru atau belum dilaksanakan karena tidak memahami perubahan peraturan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah yang diberi wewenang oleh OPD untuk dicatat dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penyusunan laporan realisasi anggaran PPKD sebagai kantor pusat disusun setiap semester/tahunan.

Pendapatan daerah diakui dan diatur dalam PP.N0 12 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerimaan Kas/Penerimaan Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah menjadi tiga kelompok, yaitu: Kelompok pertama pendapatan daerah, kelompok kedua pendapatan transfer, kelompok pendapatan kelompok ketiga adalah -penghasilan lain yang sah.

Prosedur penerimaan dalam OPD diperoleh dari pendapatan daerah, seperti pajak daerah, dana perimbangan, pendapatan hibah dan pendapatan non operasional. PP NO.12 Tahun 2019, fungsi akuntansi OPD adalah untuk mencatat perkiraan pendapatan dengan mengacu pada total pendapatan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebagai perkiraan biaya pengeluaran daerah.

Dari pengertian tersebut maka fungsi akuntansi OPD sangat penting dalam pengambilan keputusan sebagai acuan untuk memperkirakan biaya pengeluaran daerah di masa yang akan datang atau tahun anggaran baru, setiap perkiraan yang dikeluarkan akan menjadi bahan pertimbangan di masa yang akan datang berdasarkan fungsi akuntansi OPD saat ini.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan PAD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Kajian Teori

Definisi Sistem Dan Prosedur Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Hamzani, 2021), Sistem dan prosedur penerimaan asli daerah adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada OPD/PPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun komputerisasi.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi penerimaan asli daerah merupakan sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi penerimaan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sistem

Menurut Lingga S (2018), Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mamintade (2019), mendefinisikan sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Dari definisi diatas maka sistem adalah rangkaian yang dibuat untuk melaksanakan dan merealisasikan tujuan pokok dengan pola yang saling berhubungan.

Prosedur

Menurut Hamzani (2021), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang ulang.

Menurut Polli (2018), Prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Dari ungkapan diatas maka dapat di definisikan Prosedur adalah urutan atau tahapan kegiatan yang mencakup langkah, tindakan yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pokok departemen, agar memudahkan proses pengerjaan dalam entitas.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pakaila (2021), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Wahyuni (2021), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil asli ekonomi daerah tersebut. Dari definisi diatas maka dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penghasilan yang didapatkan langsung dari ekonomi dan sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam di daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Halim, dkk (2010:4) menjelaskan bahwa keuangan daerah pada peraturan perundangan dikemukakan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kemudian hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (dikenal dengan APBD, atau ditingkat pusat APBN) yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Kas

Pontoh (2013:242) menyatakan kas merupakan akun paling likuid dalam laporan keuangan yang paling membutuhkan pengawasan yang ketat dalam perolehannya maupun penggunaannya. Kas bukan sekedar uang tunai tetapi kas juga dapat berarti sesuatu yang dapat disetarakan yaitu rekening bank dari organisasi, atau akun-akun yang dapat ditunaikan dalam waktu yang sesegera mungkin, misalnya deposito, investasi saham, dan mata uang asing. Sedangkan Suwardjono (2013:255) menjelaskan kas merupakan sumber ekonomi yang memiliki manfaat atau potensi jasa karena apa yang dapat dia beli atau karena daya tukarnya yang diperlukan kesatuan usaha atau organisasi untuk melaksanakan kegiatan ekonominya.

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 187 sampai 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut (Surat edaran BAKD, 2007:9). Langkah-langkah teknis dalam penerimaan kas sebagai berikut :

Langkah 1 : PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat

penerimaan pendapatan. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan.

Langkah 2 : Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.

Penerimaan Kas Daerah

Halim (2013:101) menyatakan penerimaan kas daerah/pendapatan daerah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yang terdiri dari penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang bukan berasal dari (pajak, retribusi, dan laba usaha daerah).
2. Pendapatan Transfer; yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Yang terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah; yaitu pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan. Seperti dana kontinjensi dan dana darurat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang berasal dari daerah merupakan penghasilan yang mutlak harus diambil dan dikelola dengan baik dan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku tanpa harus ada timbal balik dari rakyat kepada pemerintah, karena kekayaan yang ada di daerah juga harus dilaporkan dari sumbernya sampai ke hasil dari pengelolaan kekayaan alam atau pendapatan pajak yang di peroleh dari retribusi dan pendapatan lain yang sah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- A. Pajak Daerah
- B. Retribusi Daerah
- C. Hasil pengelolaan kekayaan alam
- D. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sistem Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pakaila (2021), Sistem pendapatan asli daerah adalah sistem yang dibentuk untuk mempermudah dalam mengalokasikan penerimaan daerah.

Dari definisi diatas, dapat dinyatakan bahwa sistem pendapatan asli daerah adalah rangkaian proses dari penerimaan hingga pengalokasian pendapatan asli dari daerah berdasarkan sistem yang telah dibuat sebelumnya, dalam melaksanakan kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah perlu sistem yang terstruktur sehingga alur penerimaan PAD dapat terlaksana sesuai dengan aturan dan proses yang benar, maka penerimaan PAD bias dinilai efektif dan efisien.

Prosedur Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diterima oleh bendahara penerimaan di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan bentuk dari kewajiban OPD dalam menjalankan dan tanggung jawab atas terlaksananya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Terkhusus tugas ini dilaksanakan pejabat pembendaharaan daerah untuk merealisasikan anggaran- pendapatan dan belanja daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban APBD.

Pejabat pembendaharaan memiliki fungsi penting dan peran yang sangat diperlukan dalam usaha perealisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerimaan PAD memiliki tahapan prosedur yang harus dilakukan ialah:

- 1) Persiapan buku untuk melakukan pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran.
- 2) Pencatatan ke dalam buku kas umum dan buku kepala.
- 3) Pengelolaan tanda dan bukti untuk menyusun surat pertanggungjawaban.
- 4) Penyimpanan dan dokumentasi uang beserta dokumen.

Dari penjelasan diatas tahapan penerimaan pendapatan asli daerah melalui alur dan proses yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat membantu kinerja dari pelaksana pengelola penerimaan PAD dapat berjalan secara efektif dan juga efisien, maka setelah semua tahapan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri serta dinyatakan dalam bentuk buku pedoman pengelolaan keuangan daerah, dapat dikatakan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Metode Penelitian

Objek penelitian atau tempat pengambilan data Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di kantor badan pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah kota Medan jl. Sisingamangaraja Km 5,5 Medan Amplas Kota Medan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian metode deskriptif, yaitu dalam menguraikan bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerimaan PAD pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan. Variabel penelitian ini menggunakan variabel bebas (independent variable). yaitu kondisi atau karakteristik oleh peneliti- dimanipulasi dalam rangka menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Populasi penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk menentukan sampel yang akan diterapkan ada dua teknik sampling yang bisa digunakan yaitu probability sampling dan non probability sampling. Dari uraian diatas peneliti menggunakan teknik non probability, yaitu pengambilan data kepada responden yang ahli dibidangnya, dan sampel dari penelitian ini yaitu sistem dan juga prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang ada di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan Teknik yang dipakai dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan pengkajian (observasi). Metode ini dipakai untuk mengetahui berapa jauh kesesuaian antara teori yang diterapkan dengan situasi yang terjadi sebenarnya dari objek yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dan membandingkan kajian terdahulu serta pendapat para ahli juga dari keterangan tabel diatas didapatkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang penerimaan pendapatan asli daerah, metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode non probability sampling atau purposive sampling, dimana pengamatan dilakukan kepada responden yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan di bidangnya dalam hal ini bidang akuntansi pendapatan asli daerah.

Tabel Alur Proses Sistem & Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pelaksana	Langkah	Aktivasi
PPKD	1	Memberikan SKP Setelah terbit, kepada bendahara penerima dan melaksanakan verifikasi saat dilakukan penerimaan pendapatan.
Pihak Pemakai anggaran	2	Memberikan atau menyerahkan surat ketetapan retribusi yang sudah terbit, kepada bendahara penerima pada waktu bendahara melakukan proses verifikasi penerimaan pendapatan
Wajib Pajak	3	Mengambil dan menerima serta mengesahkan laporan pertanggung jawaban pendapatan dari OPD.
OPD	4	Membayar setoran pajak/ retribusi.
	5	Melaksanakan verifikasi penerimaan kas dengan SKP/SKR. Mengeluarkan surat bukti pembayaran.
Bendahara Penerima	6	Menyiapkan surat tanda setor
	7	Melaksanakan pembayaran ke bank dengan disertai surat tanda setor.
	8	Surat tanda setor setelah dialokasikan oleh bank, selanjutnya diterima lagi oleh bendahara penerima sebagai arsip dan pembukuan
	9	

Sumber : Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	Ketersediaan bukti transaksi penerimaan kas	Staff OPD	Memilah dan memberikan nomor urut bukti STS/R/C yang diterima bank
2	Melakukan register atau penomoran atas transaksi penerimaan kas	Staff OPD	Meneliti keabsahan bukti STS/R/C
3	Meneliti keabsahan bukti STS/R/C	KASubbid dan KABid	Meneliti dokumen terkait seperti STS/R/C
4	Mengentri data dokumen STS/R/C ke aplikasi SIMDA	Operator SIMDA	Pengentrian data STS/R/C
5	Membuat jurnal atas transaksi penerimaan kas	Operator SIMDA	Mengentri data ke jurnal penerimaan kas
6	Melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi	Operator SIMDA Kasubbid Kabid	Melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi
7	Melakukan posting jurnal ke buku besar	Operator SIMDA Kasubbid Kabid	Memposting ke jurnal dan buku besar
8	Penyimpanan semua data dalam database SIMDA dan dokumen transaksi diarsipkan	Staff OPD Kasubbid	Pengentrian data ke dalam database

	Kabid	
--	-------	--

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah digambarkan ke dalam tabel penerimaan pendapatan diatas, berikut penjelasannya:

1. Sistem penerimaan pendapatan asli daerah dimulai dari staff OPD yang bertugas memilah dan mengurutkan bukti-bukti penerimaan pendapatan asli daerah seperti dokumen surat tanda setor, surat tanda setor retribusi yang diterima bank.
2. Staff OPD yang bertugas memberikan nomor registrasi atas transaksi penerimaan kas daerah atau pendapatan asli daerah.
3. Mengecek keabsahan surat bukti surat tanda setor dan surat tanda setor retribusi, untuk mencegah pemalsuan data.
4. Meneliti dan mengecek kembali keabsahan surat tanda setor yang menjadi bukti dari transaksi, oleh pejabat bidang untuk melakukan pengesahan atas transaksi yang dilakukan, hal ini bias dilakukan oleh pejabat subbidang ataupun langsung kepala bidang untuk sebagai pejabat yang mengetahui
5. Mengentri data dokumen surat tanda setor ke aplikasi SIMDA, Yang dilakukan oleh operator SIMDA, Sebagai database penerimaan kas daerah atau penerimaan pendapatan asli daerah.
6. Mengentri dan membuat jurnal untuk transaksi penerimaan kas daerah, dengan menggunakan aplikasi SIMDA, Tugas ini juga dilakukan oleh operator SIMDA setelah itu dilanjutkan dengan pengetrian data ke buku besar atau diposting ke buku besar.
7. Pengecekan dan penilaian kembali oleh pejabat bidang untuk dilakukan rekonsiliasi dan rekapitulasi.
8. Pengentrian data yang telah direkapitulasi dan direkonsiliasi ke dalam database, untuk sebagai dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengarsipan dokumen transaksi berupa surat tanda setor, surat tanda setor retribusi, maupun dokumen terkait lainnya yang menyangkut ke dalam transaksi penerimaan pendapatan asli daerah di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan oleh staff OPD, Dan diketahui oleh pejabat bidang sebagai arsip pemerinh.

Pembahasan

Pada analisis ini, dilakukan pada penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan, analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah terbaru yaitu PP No. 12 Tahun 2019 tentang penerimaan pendapatan asli daerah atau belum, sistem yang digunakan pada penerimaan pendapatan asli daerah adalah berbasis aplikasi keuangan daerah (SIMDA) Yang dikelola oleh staff operator SIMDA di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan.

Tabel Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

PP No. 12 Tahun 2019	Hasil Penelitian	Keterangan
Fungsi terkait/bendahara penerima/OPD	Melakukan pencatatan dalam menerima bukti surat tanda setor penerimaan pendapatan asli daerah ke sistem aplikasi keuangan daerah (SIMDA)	Sesuai

Aktivitas		Sesuai
	Aktivitas yang dilakukan dalam prosedur penyerahan bukti penerimaan kas (STS/R/C, SKP, NOTA Kredit dari bank) yang diterima oleh staff OPD Dan dibukukan oleh bendahara penerima, dientri ke aplikasi SIMDA oleh staff operator dan kemudian di laporkan.	
Dokumen yang digunakan	Ada beberapa dokumen yang digunakan yaitu: 1. Surat Tanda Setor (STS) 2. Surat Tanda Setor Retribusi (STR) 3. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 4. Nota Kredit dari Bank.	Sesuai

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel diatas bahwa proses penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang berawal dari pencatatan penerimaan oleh pihak terkait atau fungsi yang bidang yang berwenang dalam melaksanakan penerimaan pendapatan, pendapatan yang diterima oleh bendahara penerima dicatat dan dientri ke aplikasi keuangan daerah yang terdiri dari surat tanda setoran, surat setoran retribusi pajak, surat ketetapan pajak, dan nota kredit dari bank.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Sistem penerimaan pedapatan asli daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan telah dijalankan dengan sistem keuangan daerah berbasis aplikasi yang bernama (SIMDA), dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah sudah dijalankan dengan standar operasional prosedur keuangan daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah terbaru dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini yaitu penerimaan pendapatan asli daerah yang menjadi point pada penelitian ini, dalam memecahkan masalah yang dihadapi penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan pengumpulan data pada penelitian dengan teknik wawancara (interview) dan obsevasi atau melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan, dari metode diatas maka kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 serta pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah- mencakup fungsi terkait yaitu bendahara penerima, OPD, Bank, dan bagian akuntansi sebagai pembukuan.
2. Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah, sudah menggunakan komputerisasi aplikasi keuangan daerah (SIMDA), Sehingga mempermudah pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah.

Saran

Dari kesimpulan diatas, dikemukakan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru yaitu PP No.12 Tahun 2019 Dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, dengan ini penulis memberikan saran yang

mungkin bisa menjadi masukan bagi badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan, maupun pihak dan fungsi terkait lainnya yang secara tidak langsung telah terlibat dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah, dari kesimpulan diatas berikut saran yang dapat diberikan penulis mengenai kekurangan ataupun hal yang perlu ditambah lagi dalam pelaksanaannya :

1. Pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah sebaiknya selain dicatat di komputerisasi, perlu juga di catat di back up dengan catatan manual, Karena penggunaan data melalui aplikasi beresiko hilang ataupun terkena virus computer, selain itu juga pencurian data oleh Hacker juga bisa terjadi akibat kelemahan perlindungan dari aplikasi.
2. Peningkatan keahlian/skill kepada pegawai. Peningkatan skill terhadap pegawai yang mungkin sudah lama bekerja di badan pengelolaan keuangan daerah, agar pelaksanaa program bidang dapat berjalan lebih cepat dan efektif, karena belum tentu semua pegawai lama yang bekerja di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan merupakan lulusan yang bisa teknologi, sehingga perlu diadakan program pelatihan pegawai dalam waktu yang telah ditentukan.

Referensi

- Diana, Setiawati. 2011. Sistem nformasi akuntansi, perancangan, prosedur dan penerapan. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Erlina, Omar Sakti, Rasdianto. 2015. Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Salemba empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. qbal. 2012. Pengelolaan keuangan daerah. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- (Hamzani et al., 2021)Hamzani, H., Arifin, M. A., & Putra, P. S. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 171–181.
- Wahyuni, F. (2021). *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bondowoso (Study Kasus Pada Kantor Pendapatan Daerah Bondowoso)*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mulyadi, 2013. Sistem akuntansi. Salemba empat: Jakarta.
- Raisa, Julie, harjanto. 2015. Analisis penerimaan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro, (online), (<http://ejournal.unsrat.ac.id>)
- Sugiyono, 2012 . Metode penelitian bisnis. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, 2015. Metode penelitian bisnis. Alfabeta: Bandung.
- Raisa, Julie, harjanto. 2015. Analisis penerimaan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro, (online), (<http://ejournal.unsrat.ac.id>)
- Dewi, rra Crisyanti. 2011. Pengantar lmu administrasi. PT. Prestasi pustaka raya: Jakarta
- Karamoy, Rone. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. (2013)